

2017

BUKU PROFIL ANAK DAN PEREMPUAN

DPPKBPPPA LIMA PULUH KOTA



The background features a decorative graphic consisting of three blue circles of varying sizes, each with a gradient from dark blue to light blue. These circles are arranged in a vertical line, with the largest at the top, a medium one in the middle, and the largest at the bottom. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the circles.

BUKU PROFIL ANAK DAN PEREMPUAN

Buku Pofil Anak dan Perempuan

SAMBUTAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT karena atas izin dan ridhonya “Bukuprofilanakdanperempuan” Tahun buku profil anak dan perempuan dapat disusun. Terima kasih atas kerjasama Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Tim Penyusun Buku dalam menyusun Buku Profil Anak dan Perempuan dengan Baik.

Penulisan buku ini bertujuan dalam rangka menyediakan data dan informasi tentang kondisi kesetaraan gender dan kesejahteraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017. Buku ini disajikan dalam bentuk terpilah yang berisi data tentang penduduk, pendidikan, kesehatan, peran perempuan di sektor Publik, tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan anak di DPPKBPPPA. Diharapkan dengan tersusunnya buku Profil Anak dan Perempuan ini dapat dijadikan referensi dalam pengambil kebijakan untuk membuat perencanaan dibidang kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Publikasi Buku Profil Anak dan Perempuan Tahun 2017 menyajikan informasi sangat penting guna mengevaluasi dan menyusun kebijakan, program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu dirasa perlu menyusun Buku Profil Anak dan Perempuan Tahun 2017 yang berisi data series Tahun 2016 yang merupakan kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tim Penyusun Buku dari dinas/instansi terkait pemenuhan hak perempuan dan anak.

Dengan terbitnya buku ini merupakan media dalam penyediaan informasi tentang peran perempuan di sektor Publik, baik itu dibidang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dan juga tentang kesejahteraan dan perlindungan anak, sehingga nantinya data yang ada dalam buku ini bisa dijadikan referensi dalam penyusunan perencanaan yang responsif gender dan anak.

Disamping itu penghargaan dan terimakasih kami ucapkan kepada tim penyusun buku yang terdiri dari BPS, Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan, Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan tenaga kerja, dan instansi yang terkait anak yaitu Polres, Kejaksaan dan pengadilan yang telah membantu penyusunan buku ini. Dan juga kritik dan saran dari pembaca kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Tanjung Pati, Juli 2017

Kepala DPPKBPPPA

Hj. YENNI ELVI S.ST

KATA PENGANTAR

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah, SWT Karena Atas Izin Dan Ridhonya “Buku Profil Anak Dan Perempuan Tahun 2017 dapat tersusun. Kami Bersyukur atas usaha Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta pengelolaan Data dalam menyusun Buku Perspektif Gender dan kesejahteraan perlindungan anak dengan baik.

Buku Profil Anak Dan Perempuan Tahun 2017 merupakan kelanjutan dari buku Buku Profil Anak Dan Perempuan tahun sebelumnya. Buku ini memuat informasi dan data tentang peran perempuan disektor publik, baik itu dibidang eksekutif, legislatif, ekonomi dan yudikatif dan juga kesejahteraan dan perlindungan anak .

Data dan informasi gender dan anak memegang peranan penting dalam proses perencanaan pembangunan berbasis gender dan anak. Bahkan merupakan salah satu input yang berperan sama penting dengan input-input lainnya. Oleh karena itu data gender dan anak seharusnya dianggap pula sebagai suatu sumberdaya yang harus dikelola sama baiknya dengan sumberdaya lainnya.

Dengan tersedianya data terpilah gender dan anak, maka pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan diharapkan dapat tepat sasaran dan tepat guna sehingga memberikan dampak yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Demikian pula dengan tersedianya data anak akan mempermudah proses pengarusutamaan hak anak (PUHA) dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Publikasi Buku Profil Anak Dan Perempuan Tahun 2017 di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 menyajikan informasi sangat penting guna mengevaluasi dan menyusun kebijakan, program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu dirasa perlu menyusun Buku Profil Anak Dan Perempuan Tahun 2017 yang berisi data terpilah gender dan anak Tahun 2016.

Kami sudah berusaha mengoptimalkan penyediaan data yang disajikan pada buku ini, namun demikian kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu perlu masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan dimasa datang, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama tim penyusun Buku Profil Anak Dan Perempuan Tahun 2017 yang sudah memberi bantuan. Semoga data dan informasi yang disajikan bermanfaat adanya.

Tanjung Pati, Juli 2017

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Yulia Masna, SK.M.M.MK.es

TIM PENYUSUN BUKU

Pengarah

Hj. YENNI ELVI,S.ST

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak**

Penanggung Jawab

YULIA MASNA, SKM

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

KETUA

ERLIYENTI, SKM

Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak

EDITOR

WARTI

Anggota

Aslidar,AMd Keb,Santi Desmara,AMd Keb,Yova Oktavina,S.Psi

Kontributor

**BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Polres Lima Puluh Kota, Polres Kota
Payakumbuh, Kejaksaan, Pengadilan, BKD, Dinsosnakertrans, Diskdukcapil dan**

DPPKBPPPA Kab.Lima Puluh Kota.

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

SAMBUTAN KEPALA BADANii

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sumber Data	3

BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Letak Administratif	4
2.2 Situasi Geografis	5

BAB III : KEPENDUDUKAN

3.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin	6
3.2 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	8

BAB IV : PENDIDIKAN

4.1 Keadaan Pendidikan	12
4.2 Kinerja pendidikan dasar dan menengah	17

BABV : KESEHATAN

5.1 Mortalitas	26
5.2 Morbiditas	30
5.3 Status Gizi	31

	5.4 Keluarga Berencana	33
BAB VI	:PERAN PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK	
	6.1.Partisipasi Perempuan dibidang legislatif	34
	6.2 Partisipasi Perempuan dibidang Eksekutif	36
	6.3 Partisipasi Perempuan dibidang Yudikatif	37
BAB VII	:EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
	7.1 Penduduk dengan Kegiatan Utama	42
	7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	43
	7.3 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin	44
	7.4 Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin	45
BAB VIII	:KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	8.1 Kepemilikan Akte Kelahiran	47
	8.2 Kekerasan Terhadap Perempuan	49
	8.3 Kekerasan Terhadap Anak	56
	8.4 Anak Yang ditampung Di Panti	58
	8.5 Anak Berkebutuhan Khusus	59
BAB IX	:PENUTUP	
	9.1 Kesimpulan	60
	9.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan pada era millenium, millenium development Goals (MDG'S) adalah menuju kemitrsejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Akan tetapi masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan angka indeks pemberdayaan gender. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) memberikan arah yang sangat kuat untuk mewujudkan bangsa indonesia yang berdaya saing salah satunya melalui pembangunan manusia indonesia yang berkualitas yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) , indek pembangunan gender (IPG) serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan angka kelahiran total (total fertility rate) sebesar 2,1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut selanjutnya mengamanatkan perlunya peningkatan berbagai prioritas program di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai sasaran pembangunan, namun disadari hasil pembangunan tersebut belum dapat dinikmati perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan belum terpenuhi oleh perencana dalam mengambil keputusan. Contohnya saja dari 35 anggota

DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya 3 orang (8,6%) perempuan, padahal 50,4 % penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perempuan.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah dan organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang anak telah berupaya memenuhi hak-hak anak melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang dirancang bagi kepentingan anak. Dengan tersedianya data gender dan anak yang terpilah menjadi salah satu hal yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender dan anak. Dengan tersedianya data yang tepat dan akurat maka akan memudahkan dalam melahirkan perencanaan yang responsif gender dan anak.

Dengan disusunnya buku profil anak dan perempuan merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi berkelanjutan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan

ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan anak dan peran perempuan disektor Publik. Sedangkan data tentang anak berkaitan dengan data kelembagaan yang terkait unsur-unsur pengarusutamaan hak anak, yang berfungsi secara efektif dalam pemenuhan hak anak untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan hak anak diseluruh bidang dan dilengkapi dengan anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang cacat.

1.3 Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari dari berbagai instansi, OPD baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Instansi terkait (Polres, Kejaksaan, Pengadilan dan Kemenag) di Kabupaten Lima Puluh Kota serta dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Letak Administratif

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71"LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10" - 100050'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 Km². Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 Km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu 61,68 Km². Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter.

Disamping itu Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yang indah dan sangat potensial sebagai objek wisata yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), Gunung Sanggul (1.495 m) serta 13 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/irigasi.

Jika dilihat secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 13 Kecamatan dan 79 Nagari serta 407 jorong, dimana terjadi penambahan 3 jorong di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh dan 1 jorong di Nagari Gurun Kecamatan Harau. Dari 13 kecamatan ini, Kecamatan Harau yang mempunyai jumlah nagari terbanyak yaitu 11 nagari dan 44 jorong, sedangkan yang mempunyai jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Gunung Omeh hanya dengan 3 nagari dan 17 jorong, namun kalau kita lihat lebih rinci perkecamatanannya dapat dilihat seperti dibawah ini:

1. Kecamatan Harau
2. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3. Kecamatan Kapur IX
4. Kecamatan Luhak
5. Kecamatan Lareh Sago Halaban

6. Kecamatan Situjuah Limo Nagari
7. Kecamatan Payakumbuh
8. Kecamatan Akabiluru
9. Kecamatan Mungka
10. Kecamatan Guguak
11. Kecamatan Gunuang Omeh
12. Kecamatan Bukit Barisan
13. Kecamatan Suliki

2.2 Situasi Geografis

Secara geografis Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibukota Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah : Bukittinggi 43 km, Padang Panjang 62 km, Padang 134 km, Batusangkar 48 km, Painan 211 km, Lubuk Sikaping 120 km, Pariaman 120 km, Sawahlunto 147 km, Solok 116 km, Sijunjung 179 km. Padang Aro 228 km. Pulau Punjung 243 km. Simpang Ampek 242 km. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota: Koto Baru Simalanggang 16 km, Sariak Laweh 26 Km, Pakan Sabtu 19 km, Situjuah Banda Dalam 20 km, Pakan Rabaa 24 km, Tanjung Pati 2 km, Dangung-Dangung 24 km, Mungka 26 km, Padang Loweh 35 km, Koto Tinggi 55 km, Banja Loweh 36 km, Pangkalan 44 km dan Muaro Paiti 78 km.

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter. Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibukota Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah : Payakumbuh 10 Km, Bukittinggi 43 Km, Padang Panjang 62 Km, Padang 134 Km, Batusangkar 48 Km, Painan 211 Km, Lubuk Sikaping 120 Km, Pariaman 120 Km, Sawahlunto 147 Km, Solok 116 Km, Sijunjung 179 Km, Padang Aro 228 Km, Pulau Punjung 243 Km, Simpang Ampek 242 Km.

Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota :Koto Baru Simalanggang 16 Km, Sariak Laweh 26 Km, Pakan Sabtu 19 Km, Situjuah Banda Dalam 20 Km, Pakan Rabaa 24 Km, Tajung Pati 2 Km, Dangung-Dangung 24 Km, Mungka 26 Km, Padang Loweh 35 Km, Koto Tinggi 55 Km, Banja Loweh 36 Km, Pangkalan 44 Km, Muaro Paiti 78 Km.

BAB III KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 tercatat sebanyak 372.568 jiwa, dengan rincian 184.995 jiwa penduduk laki-laki dan 187.573 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 99 %. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin adalah 99, maka angka ini memperlihatkan bahwa pada umumnya di daerah kecamatan kabupaten lima puluh kota jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Jumlah yang relatif lebih banyak ini tentunya mempunyai implikasi terhadap berbagai aspek pembangunan di kabupaten lima puluh kota, baik aspek sosial, budaya, maupun aspek politik. Dengan kata lain penduduk perempuan perlu mendapatkan perhatian terkait dengan berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun perlindungan hukum, karena secara sosial budaya perempuan dihadapkan pada tuntutan sosial budaya yang berbeda dengan laki-laki.

3. 1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio jenis Kelamin
1	Payakumbuh	17153	17454	98
2	Akabiluru	13342	13695	97
3	Luak	13389	13803	97
4	Lareh Sago Halaban	18429	18822	98
5	Situjuah Limo Nagari	10597	11066	96
6	Harau	25173	25033	101
7	Guguak	17641	18660	95
8	Mungka	13218	13574	97
9	Suliki	7386	7857	94
10	Bukik Barisan	11399	11825	96

11	Gunuang Omeh	6672	6652	100
12	Kapur IX	15145	14276	106
13	Pangkalan Koto Baru	15451	14856	104
	Kabupaten	184.995	187.573	99

Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota

Pada daerah-daerah tertentu juga ditemukan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Daerah tersebut adalah kecamatan Harau, Kapur IX, Pangkalan dan Gunuang Omeh. Secara ekonomi dapat dikatakan bahwa daerah-daerah dengan jumlah laki-laki lebih banyak adalah pada daerah-daerah perkebunan.

Tabel 3.2
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas /Area (km ²)	Penduduk	Kepadatan Per km ²
1	Payakumbuh	99.47	34607	348
2	Akabiluru	94.26	27037	257
3	Luak	61.68	27192	441
4	Lareh Sago Halaban	394.85	37251	94
5	Situjuh Limo Nagari	74.18	21663	292
6	Harau	416.80	50206	120
7	Guguak	106.20	36301	342
8	Mungka	83,76	26792	320
9	Suliki	136.94	15243	111
10	Bukik Barisan	294.20	23224	79
11	Gunuang Omeh	156.54	13324	85
12	Kapur IX	723.36	29421	41
13	Pangkalan Koto Baru	712.06	30307	43
	Kabupaten	3.354.30	372.568	111

Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota

Kemudian kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 mencapai 111 jiwa per km² dengan luas kabupaten sebesar 3.354,30 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Luak dengan tingkat kepadatan sebesar 441 jiwa per km², dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 41 jiwa per km². Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh

Kota pada tahun 2016 tercatat sebesar 93.476. Maka rata-rata anggota rumah tangga pada tahun 2016 tercatat sebesar 4 jiwa per rumah tangga.

3.1 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	19602	18683	38285
2	5-9	19355	18433	37788
3	10-14	17486	16244	33730
4	15-19	14675	13030	27705
5	20-24	11687	11371	23058
6	25-29	13533	13452	26985
7	30-34	14032	14215	28247
8	35-39	13619	13918	27537
9	40-44	12217	12071	24288
10	45-49	10556	10693	21249
11	50-54	9546	10750	20296
12	55-59	9175	10548	19723
13	60-64	7875	8237	16112
14	65+	11637	15928	27565
	Kabupaten	184.995	187.573	372.568

Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah sebanyak 38.285 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 60 s/d 64 tahun yaitu sebesar 16.112 jiwa.

Bila dilihat jumlah penduduk pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) ternyata jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dibanding laki-laki. Bila dilihat jumlah penduduk pada usia 40-64, menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan

politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.

Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja.

Pada tahun 2016 jumlah Angkatan kerja tercatat sebesar 187.746 jiwa dengan rincian 180.648 jiwa bekerja dan sebesar 7.098 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2016 sebesar 72.317 jiwa dengan rincian sebanyak 22.960 jiwa sedang bersekolah, 34.591 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 14.766 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

Tabel 3.4
Perkembangan Jumlah Penduduk dari Tahun 2011 s/d Tahun 2016
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016

NO	Tahun	Jlh Nagari	Jlh Penduduk	Kepadatan penduduk/Nagari
1.	2016	79	372.568	4.716
2.	2015	79	368.985	4.671
3.	2014	79	365.389	4.625
4.	2013	79	361.597	4.577
5.	2012	79	359.859	4.555

Sumber : BPS Kab. Lima Puluh Kota

Jika dilihat tabel 3.4 tentang perkembangan jumlah penduduk, maka penambahan jumlah penduduk yang paling besar adalah pada tahun 2014 yaitu 3.596 jiwa, sementara penambahan penduduk tahun 2016 hanya 3.583 jiwa dan tahun 2012 sebanyak 1.738 jiwa.

BAB IV PENDIDIKAN

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya setiap orang harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dari negara tanpa ada diskriminasi baik atas dasar ras, etnis, suku, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Pendidikan bertujuan untuk membuat peserta didik mempunyai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sehingga mereka menjadi manusia yang manusiawi yang dapat tumbuh bersama di dalam masyarakat. Data dibawah ini dapat memberi gambaran seperti apa pemenuhan hak-hak pendidikan yang telah diberikan kepada setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan, yang tinggal di desa maupun yang tinggal di pusat ibu kota kabupaten.

Tingkat pendidikan merupakan Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks pembangunan manusia suatu negara (HDI = Human Development Index). Indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten lima puluh kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. IPM tahun 2016 tercatat sebesar 68,37, hal ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 67,65. Peningkatan IPM ini juga didukung oleh peningkatan komponen pendukung IPM itu sendiri yaitu angka harapan hidup tahun 2016 adalah 69,27 %, angka melek huruf 99,10 %, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita.

Angka melek huruf yaitu presentase penduduk umur 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Pada tahun 2016 angka melek huruf menjadi 99,10%.

Kemajuan Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakan program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin. Secara rinci, pembangunan disetiap jenjang pendidikan tidak sama untuk lebih jelasnya keadaan tingkat pendidikan TK, SD, SMP dan SMA.

4.1 KEADAAN PENDIDIKAN

4.1.1 Pendidikan Taman Kanak- Kanak

Jumlah Taman Kanak-kanak pada tahun 2016 tercatat sebanyak 231 buah. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, tidak terjadi penambahan maupun penurunan jumlah lembaga, jumlah lembaga yang paling banyak adalah di kecamatan Guguak yang berjumlah 28 lembaga, dan kecamatan yang paling sedikit jumlahnya adalah kecamatan Harau yaitu 8 lembaga. Sementara kalau kita lihat jumlah murid yang terdaftar pada tahun 2016 adalah sebanyak 6.654 murid. Kemudian untuk jumlah guru sebanyak 455 orang.

Tabel 4.1
Banyak Murid, Guru dan Lembaga Menurut Kecamatan
Pada Tingkat Taman Kanak-Kanak
Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Lembaga	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	Gunuang Omeh	15	239	35
2	Bukik Barisan	23	400	35
3	Suliki	12	222	35
4	Guguak	28	615	35
5	Mungka	12	413	35
6	Akabiluru	19	534	35
7	Payakumbuh	18	743	35
8	Luak	18	337	35
9	Lareh Sago Halaban	14	1013	35
10	Situjuh Limo Nagari	27	217	35
11	Harau	8	1003	35
12	Pangkalan Koto Baru	15	426	35
13	Kapur IX	22	492	35
	Jumlah	231	6.654	455

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

4.1.2 Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Banyaknya Sekolah Dasar pada tahun 2016 tercatat sebanyak 367 dengan rincian sekolah negeri 364 sekolah dan swasta 3 sekolah. Kalau kita lihat jumlah murid tahun 2016 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu 46.458 jika dibandingkan dengan jumlah yang ada pada tahun 2015 yaitu 45.803. Jumlah guru pada tahun 2016 adalah 3.955 orang. Sementara untuk menampung jumlah siswa tersebut tersedia jumlah kelas 2.423.

Rata-rata guru yang dapat melayani siswa juga bervariasi dengan rasio tahun 2016 tingkat SD/MI yaitu 8,79 %.

Tabel 4.2
Rasio Guru Terhadap Murid Menurut Kecamatan
Pada Tingkat Sekolah Dasar
Tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	RASIO
1	Gunuang Omeh	1590	206	12.96
2	Bukik Barisan	2636	310	11.76
3	Suliki	1723	196	11.38
4	Guguak	4467	435	9.74
5	Mungka	3403	253	7.43
6	Akabiluru	3277	300	9.15
7	Payakumbuh	4097	363	8.86
8	Luak	2720	237	8.71
9	Lareh sago Halaban	4685	348	7.43
10	Situjuah Limo Nagari	2613	256	9.80
11	Harau	6486	449	6.92
12	Pangkalan Koto Baru	3758	298	7.93
13	Kapur IX	3543	304	8.58
	Jumlah	44998	3955	8.79

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.3
Rasio Ketersediaan Sekolah Menurut Kecamatan
Pada Tingkat Sekolah Dasar
Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah	
			Penduduk Usia 7 – 12 Tahun	Rasio
1	Gunuang Omeh	21	1660	126,50
2	Bukik Barisan	31	2578	120,24
3	Suliki	21	1953	107,52
4	Guguak	40	4670	85,65
5	Mungka	20	3431	58,29
6	Akabiluru	26	3673	70,78
7	Payakumbuh	29	4635	62,56
8	Luak	22	3161	69,59
9	Lareh Sago Halaban	34	4404	77,20
10	Situjuah Limo Nagari	23	2852	80,64
11	Harau	40	6252	63,97
12	Pangkalan Koto Baru	29	4276	67,82
13	Kapur IX	31	3919	79,10
	Jumlah	367	47.464	77,32

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

4.1.3 Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2015/2016, Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) dan MTs pada tahun 2016 sebanyak 51 sekolah, . Jumlah siswa SLTP dan MTs seluruhnya sebesar 13.627 Guru yang mengajar di SLTP dan MTs sebanyak 1.317 orang dengan rasio terhadap murid adalah 9,66%. Dan rasio ketersediaan sekolah adalah 26,07 %.

Tabel 4.4
Rasio Guru terhadap Murid Menurut Kecamatan
Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta
Tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah Murid	Jlh Guru	RASIO
1	Gunuang Omeh	519	49	9.44
2	Bukik Barisan	478	50	10.46
3	Suliki	617	68	11.02
4	Guguak	1437	132	9.19
5	Mungka	732	95	12.98
6	Akabiluru	638	79	12.38
7	Payakumbuh	1600	150	9.38
8	Luak	925	102	11.03
9	Lareh sago Halaban	1596	130	8.15
10	Situjuah Limo Nagari	579	64	11.05
11	Harau	1960	189	9.64
12	Pangkalan Koto Baru	1225	109	8.90
13	Kapur IX	1321	100	7.57
	Jumlah	13627	1317	9.66

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.5
Rasio Ketersediaan Sekolah Menurut Kecamatan
Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah		JLH Penduduk Usia 13-15 Tahun	Rasio
1	Gunuang Omeh	2		614	32,57
2	Bukik Barisan	3		998	30,06
3	Suliki	2		737	27,13
4	Guguak	5		1880	26,59
5	Mungka	3		1447	20,73
6	Akabiluru	3		1439	20,87
7	Payakumbuh	5		1910	26,17
8	Luak	4		1469	27,22
9	Lareh Sago Halaban	5		1815	27,54
10	Situjuah Limo Nagari	2		1132	17,66

11	Harau	6		2747	21,84
12	Kapur IX	6		1610	96,60
13	Pangkalan Koto Baru	5		1762	28,37
	Jumlah	51		19560	26,07

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

4.1.4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan SMK

Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri+Swasta dan SMK di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 19.

Tabel 4.6
Rasio Ketersediaan Sekolah Menurut Kecamatan
Pada Sekolah Menengah Atas Negeri
Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun	Rasio Ketersediaan Sekolah/10.000
1	Gunuang Omeh	1	472	21,18
2	Bukik Barisan	1	773	12,93
3	Suliki	2	688	29,06
4	Guguak	3	1776	16,89
5	Mungka	0	1267	0
6	Akabiluru	1	1392	7,18
7	Payakumbuh	1	1789	5,58
8	Luak	2	1366	14,64
9	Lareh sago Halaban	1	1645	6,07
10	Situjuah Limo Nagari	1	1054	9,48
11	Harau	2	2623	7,62
12	Pangkalan Koto Baru	2	1538	13,00
13	Kapur IX	2	1360	14,70
	Jumlah	19	17.743	10,70

Tabel 4.7
Rasio Guru terhadap Murid Menurut Kecamatan
Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta
Tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	RASIO
1	Gunuang Omeh	160	6	3.75
2	Bukik Barisan	128	10	7.81
3	Suliki	1190	97	8.15
4	Guguak	2303	193	8.38
5	Mungka	66	0	0.00
6	Akabiluru	548	43	7.85
7	Payakumbuh	719	42	5.84
8	Luak	996	85	8.53
9	Lareh Sago Halaban	802	57	7.11
10	Situjuh Limo Nagari	571	56	9.81
11	Harau	1219	80	6.56
12	Pangkalan Koto Baru	944	55	5.83
13	Kapur IX	691	44	6.37
	Jumlah	10.337	768	7.43

Jumlah siswa SMA tahun 2016 seluruhnya sebesar 10.337 siswa naik jika dibandingkan jumlah siswa tahun 2015. Guru yang mengajar di SMA sebanyak 768 Dan rasio guru terhadap murid adalah 7.43 %.

Untuk menampung jumlah siswa tersebut, tersedia 19 sekolah dengan kapasitas ruang kelas sebanyak 271.

Bila dilihat SMA, dapat digambarkan pula bahwa jumlah rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk yang berumur 16-18 tahun adalah 10,10 %. SMA lebih besar jika dibandingkan dengan SMK. Jumlah SMA sebesar 19 dengan jumlah siswa sebanyak 17.743 dan ruang kelas sebanyak 190 dan ditangani oleh guru sebanyak 768.

4.2. KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

4.2.1 Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi Murni merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka ini dapat digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 4.8
Angka Partisipasi Murni (APM)
Pada Jenjang Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Menurut Kecamatan
Tahun 2016

No	Kecamatan	SD		
		Jumlah Murid usia 7-12 thn	Jumlah Pddk 7-12 Tahun	APM
1	Gunuang Omeh	1,435	1,660	86
2	Bukit Barisan	2,319	2,578	90
3	Suliki	1,538	1,953	79
4	Guguak	3,947	4,670	85
5	Mungka	2,969	3,431	87
6	Akabiluru	2,850	3,673	78
7	Payakumbuh	3,621	4,635	78
8	Luak	2,411	3,161	76
9	Lareh Sago Halaban	4,117	4,404	93
10	Situjuah Limo Nagari	2,247	2,852	79
11	Harau	5,631	6,252	90
12	Pangkalan Koto Baru	3,326	4,276	78
13	Kapur IX	3,109	3,919	79
	Kabupaten	39,520	47,464	83

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.9
 Angka Partisipasi Murni (APM)
 Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menurut Kecamatan
 Tahun 2016

No	Kecamatan	SLTP		
		Jumlah Murid 13-15 thn	Jumlah Pddk 13-15 Tahun	APM
1	Gunuang Omeh	427	614	69.54
2	Bukit Barisan	367	998	36.77
3	Suliki	486	737	65.94
4	Guguak	1,127	1,880	59.95
5	Mungka	526	1,447	36.35
6	Akabiluru	474	1,439	32.94
7	Payakumbuh	1,243	1,910	65.08
8	Luak	739	1,469	50.31
9	Lareh Sago Halaban	1,286	1,815	70.85
10	Situjuah Limo Nagari	423	1,132	37.37
11	Harau	1,540	2,747	56.06
12	Pangkalan Koto Baru	976	1,762	55.39
13	Kapur IX	1,026	1,610	63.73
	Kabupaten	10,640	19,560	54.40

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.10
 Angka Partisipasi Murni (APM)
 Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Menurut Kecamatan
 Tahun 2016

No	Kecamatan	SLTA		
		Jumlah Murid SMA/MA/SMK Usia 16-18	Jumlah Pddk 16-18 Tahun	APM
1	Gunuang Omeh	128	472	27.12

2	Bukit Barisan	103	773	13.32
3	Suliki	998	688	145.06
4	Guguak	1,823	1,776	102.65
5	Mungka	58	1,267	4.58
6	Akabiluru	449	1,392	32.26
7	Payakumbuh	564	1,789	31.53
8	Luak	802	1,366	58.71
9	Lareh Sago Halaban	651	1,645	39.57
10	Situjuah Limo Nagari	448	1,054	42.50
11	Harau	989	2,623	37.70
12	Pangkalan Koto Baru	743	1,538	48.31
13	Kapur IX	544	1,360	40.00
	Kabupaten	8,300	17,743	46.78

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

APM tertinggi tahun 2016 terdapat ditingkat SD yaitu 83 %, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SD tahun 2015 yaitu 83 %. APM terendah adalah tingkat SMA yaitu 46,78%, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMA tahun 2015 adalah 43,1 %. Berdasarkan tabel 4.8, 4.9 dan 4.10 dapat diketahui APM paling tinggi adalah pada tingkat SD, anak yang bersekolah diusia 7-12 tahun (sesuai umur sekolah SD) lebih tinggi APM dibandingkan dengan tingkat lainnya (SMP dan SMU). Hal itu juga menunjukkan kesesuaian usia sekolah dengan jumlah murid yang bersekolah pesentasenya tinggi tingkat SD.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi Kasar (APK) dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan yang sesuai. Persentase APK ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan dalam memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 4.11
 Angka Partisipasi Kasar (APK)
 Pada Jenjang Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Menurut Kecamatan
 Tahun 2016

No	Kecamatan	SD		
		Jumlah Murid	Jumlah Pddk 7-12 Tahun	APK
1	Gunuang Omeh	1,590	1,660	95.78
2	Bukik Barisan	2,636	2,578	102.25
3	Suliki	1,723	1,953	88.22
4	Guguak	4,467	4,670	95.65
5	Mungka	3,403	3,431	99.18
6	Akabiluru	3,277	3,673	89.22
7	Payakumbuh	4,097	4,635	88.39
8	Luak	2,720	3,161	86.05
9	Lareh Sago Halaban	4,685	4,404	106.38
10	Si 7 Limo Nagari	2,613	2,852	91.62
11	Harau	6,486	6,252	103.74
12	Pangkalan Koto Baru	3,758	4,276	87.89
13	Kapur IX	3,543	3,919	90.41
	Kabupaten	44,998	47,464	94.80

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.12
 Angka Partisipasi Kasar (APK)
 Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menurut Kecamatan
 Tahun 2016

No	Kecamatan	SLTP		
		Jumlah Murid	Jumlah Pddk 13-15 Tahun	APK
1	Gunuang Omeh	519	614	84.53
2	Bukik Barisan	478	998	47.90
3	Suliki	617	737	83.72
4	Guguak	1,437	1,880	76.44
5	Mungka	732	1,447	50.59

6	Akabiluru	638	1,439	44.34
7	Payakumbuh	1,600	1,910	83.77
8	Luak	925	1,469	62.97
9	Lareh Sago Halaban	1,596	1,815	87.93
10	Si 7 Limo Nagari	579	1,132	51.15
11	Harau	1,960	2,747	71.35
12	Pangkalan Koto Baru	1,225	1,762	69.52
13	Kapur IX	1,321	1,610	82.05
	Kabupaten	13,627	19,560	69.67

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.13
 Angka Partisipasi Kasar (APK)
 Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Menurut Kecamatan
 Tahun 2016

No	Kecamatan	SLTA		
		Jumlah Murid SMA/MA/SMK	Jumlah Pddk 16-18 Tahun	APK
1	Gunuang Omeh	160	472	33.90
2	Bukik Barisan	128	773	16.56
3	Suliki	1,190	688	172.97
4	Guguak	2,303	1,776	129.67
5	Mungka	66	1,267	5.21
6	Akabiluru	548	1,392	39.37
7	Payakumbuh	719	1,789	40.19
8	Luak	996	1,366	72.91
9	Lareh Sago Halaban	802	1,645	48.75
10	Si 7 Limo Nagari	571	1,054	54.17
11	Harau	1,219	2,623	46.47
12	Pangkalan Koto Baru	944	1,538	61.38
13	Kapur IX	691	1,360	50.81
	Kabupaten	10,337	17,743	58.26

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari tabel 4.11 dapat dilihat angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) tahun 2016 adalah 94,80 %, menurun jika dibandingkan tahun 2015 yaitu 114,9 %, akan tetapi pada tingkat SLTP angka partisipasi tahun 2016 lebih rendah dari pada murid SD yaitu 69,67 namun juga jika dibandingkan dengan APK tahun 2015 yaitu 81,8%. Namun jika dilihat pada sekolah lanjutan tingkat atas angka partisipasi kasar tahun 2016 adalah 58,26 % lebih rendah dibanding tahun 2015 yaitu 62,6 %. Berdasarkan APK yang ada ternyata dapat dideskripsikan APK tertinggi terdapat di tingkat SD. Tingginya APK tingkat SD adalah akibat banyaknya siswa yang usia umurnya diluar usia sekolah dasar yang berada dijenjang pendidikan tersebut. Hal ini menunjukkan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada usia sekolah yang tepat waktu lebih sedikit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai persentase APK yang paling tinggi jika dibandingkan tingkat SMP dan SMA.

4.2.2 Peningkatan mutu pendidikan

Pendidikan dikatakan bermutu bila digunakan alat ukur yaitu indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima jenis yaitu : (1) mutu masukan, (2). Mutu proses, (3) mutu output, (4) mutu SDM, dan mutu fasilitas. Mutu masukan dimaksud dihasilkan dari siswa tingkat SD yang pernah mengikuti TK atau sejenisnya ternyata lebih unggul dalam arti tidak pernah mengulang dan tidak putus sekolah sampai lulus tingkat SD.

Mutu proses dimaksud dihasilkan selama proses belajar berlangsung yaitu ditandai dengan siswa yang mengulang dan putus sekolah. Mutu output dimaksud adalah mutu yang dihasilkan dari banyaknya siswa yang lulus. Mutu SDM dimaksud adalah mutu yang dihasilkan akibat cara mengajar, tingkat pendidikan dan kesesuaian mengajar guru. Mutu fasilitas dimaksud diperoleh dari adanya fasilitas sekolah yang digunakan dalam kondisi atau kecukupan fasilitas yang diperlukan sekolah.

Angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SLTA/SMA yaitu sebesar 1,02 persen dan terendah ditingkat SD yaitu 0,07 persen. Berdasarkan mutu output ternyata siswa yang lulus tertinggi terdapat pada tingkat SD yaitu 100 persen dan terendah di tingkat SMA yaitu 99,94 persen.

Tabel 4.14
Angka Putus Sekolah, Angka Lulusan Dan Layak Sekolah
Tahun 2015

NO	Indikator	SD + MI	SMP + MTs	SM + MA
1	Angka Putus Sekolah	0,07	0,33	1,02
2	Angka lulusan	100	99,98	99,94
3	Angka kelayakan mengajar			
	a. Layak	81,99	78,24	100
	b. Tidak Layak	18,01	21,76	0

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

4.2.3. Efisiensi Internal Pendidikan

Untuk memahami apakah sekolah yang ada telah efisien, alat ukur yang digunakan adalah efisiensi internal pendidikan. Alat ukur yang dimaksud meliputi 8 jenis indikator yaitu keluaran, jumlah tahun siswa, jumlah putus sekolah, jumlah mengulang, lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masukan perlulusan dan rasio keluaran dan masukan.

Jumlah keluaran adalah jumlah siswa satu angkatan yang dapat lulus pada suatu jenjang pendidikan. Jumlah tahun siswa adalah tahun yang dihabiskan oleh siswa satu angkatan dalam suatu jenjang pendidikan. Jumlah putus sekolah adalah jumlah siswa satu angkatan yang keluar dari suatu jenjang pendidikan sebelum tamat. Jumlah mengulang adalah jumlah siswa satu angkatan yang mengulang dari suatu jenjang pendidikan.

Tabel 4.17
Internal Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2015

NO	Indikator	SD + Madrasah Ibtidaiyah (MI)	SMP + Madrasah Tsanawiyah (MTs)	SMA + Madrasah Aliyah (MA)
1	Jumlah Tahun siswa	6.01	3.000	3.000
2	Jumlah Putus Sekolah	32	26	32
3	Rata-rata Lama Belajar (tahun)			
	a. Lulusan	6,60	3,07	3,01
	b. Putus Sekolah	0,07	0,2	0,3
	c. Kohor	6,01	3,00	3,00

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

Rata-rata lama belajar lulusan adalah waktu yang diperlukan oleh siswa satu angkatan sampai lulus dari suatu jenjang pendidikan. Tahun siswa terbuang adalah tahun yang dihabiskan siswa satu angkatan karena pernah mengulang dan putus sekolah dari suatu jenjang pendidikan. Tahun masukan perlulusan adalah tahun yang diperlukan siswa satu angkatan

pada waktu masuk sekolah sampai lulus dari suatu jenjang pendidikan. Rasio keluaran permasukan adalah perbandingan antara siswa satu angkatan yang lulus dengan ketika masuk.

Jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka kohort 1.000 adalah pada tingkat SMP + MTs sebesar 980. Jumlah tahun siswa yang seharusnya untuk tingkat SD + Madrasah Ibtidaiyah 6.01 untuk tingkat SMP + Madrasah Tsanawiyah 3.000 dan SMA sebesar 3.000. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 terdapat pada semua tingkat SMP/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar 26 orang. Selanjutnya jumlah mengulang yang mendekati 0. Untuk melihat efisiensi atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa. Untuk tingkat SD + Madrasah Ibtidaiyah (MI) seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun dan tingkat SMP + Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA seharusnya 3 tahun sehingga tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan ternyata yang kondisinya terbaik adalah pada tingkat SD yaitu 6,60 dan bila dilihat lama belajar, putus sekolah ternyata siswa yang putus sekolah mendekati lulus yang terbaik adalah pada tingkat SD yaitu sebesar 0,07 tahun. Disamping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah yang terbaik juga tingkat SMA yaitu 3,00 dan SMP juga 3.00

Efisien atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun siswa terbuang. Tahun siswa terbuang dapat dirinci menjadi 3 yaitu : terbuang karena mengulang, putus sekolah dan gabungan antara mengulang dan putus sekolah. Tahun siswa terbuang yang terbaik yang berarti nilainya mendekati 0.

BAB V

KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya merupakan arah dari pembangunan kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah mortalitas, morbiditas dan status gizi. Mortalitas ditentukan oleh angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan angka harapan hidup.

Morbiditas ditentukan oleh angka kesakitan malaria, angka kesembuhan penderita TB Paru BTA (+), Prevalensi HIV, Angka "Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia < 15 Tahun, dan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Status gizi ditentukan oleh presentase balita gizi buruk dan presentase kecamatan bebas rawan gizi.

5.1 MORTALITAS

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas pertama yang dilihat adalah angka kematian bayi (AKB). Angka kematian bayi dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 adalah 13,35 dengan rincian 8,84 laki-laki dan 4,50 perempuan dengan jumlah kasus 83 kasus, kasus kematian bayi tertinggi terjadi di kecamatan harau yakni sebanyak 15 kasus, kedua di kecamatan payakumbuh sebanyak 12 kasus dan terkecil di kecamatan akabiluru yakni 1 kasus.

Penyebab kematian bayi terbanyak di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
10 Penyebab terbanyak angka kematian bayi di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016

NO	Penyebab	Kelompok Umur		
		0-28 Hari	29 Hari – 11 Bulan	Total
1	2	3	4	5
1	Prematur	13	0	13
2	Asfiksia	12	0	12
3	Kelainan Bawaan	8	3	11
4	BBLR	5	0	5
5	Kelainan Jantung	4	6	10
6	Aspirasi	3	0	3
7	Kelainan Darah	2	0	2
8	Kelainan Cerna	2	2	4
9	Hipotermi	1	0	1
10	Trauma Lahir	1	0	1
11	Suspek Meningitis	1	0	1
12	Diare	0	1	1
13	Pnemoni	0	5	5
14	Meningitis	0	2	2
15	Kejang Demam	0	3	3
16	Atresia Ani	0	1	1
17	Perdarahan Intracranial	0	1	1
18	Kecelakaan	0	3	3
19	Illeus	0	1	1
20	Kelainan Tumbang	0	1	1

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota*

Dari data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa premature dan asfiksia menjadi penyebab kematian terbanyak pada usia 0-28 hari, sedangkan usia 29 Hari – 11 bulan kelainan jantung dan Pnemonia menjadi penyebab terbanyak. Dalam SDKI 2012 lebih dari tiga perempat dari semua kematian balita terjadi dalam tahun pertama kehidupan anak dan mayoritas kematian bayi terjadi pada periode neonatus.

2. Kematian Ibu

Kematian maternal adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama

dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau penanganannya. Angka kematian ibu dan bayi merupakan tolak ukur dalam menilai derajat kesehatan suatu bangsa.

Angka kematian maternal ini merupakan ukuran yang mencerminkan risiko obstetric yang dihadapi oleh seorang wanita setiap kali wanita tersebut menjadi hamil. Risiko ini semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kehamilan yang dialami. Tingginya angka kematian maternal di negara berkembang sebagian besar berkaitan dengan masalah politik dan sosial, khususnya masalah kemiskinan dan status wanita.

Berdasarkan data dari Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2017 didapatkan jumlah kematian ibu tahun 2016 sebanyak 6 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan dari tahun lalu berjumlah 4 kasus kematian ibu tahun 2015 dibawah target MDG,s Tahun 2015, dimana pada tahun 2015 target MDG,s adalah 102 per 100.000 KLH.

3. Jumlah Kematian Balita

Jumlah kematian balita menggambarkan peluang untuk meninggal pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. AKABA pada tahun 2016 berjumlah 65 orang, dengan jumlah kematian terbanyak di kecamatan guguk 11 kasus, payakumbuh 10 kasus dan yang paling sedikit gunuang omeh 1 kasus, jumlah ini juga mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang berjumlah 18 orang. Jumlah kematian terbanyak berasal dari kecamatan guguk yaitu 11 orang.

Secara nasional angka kematian balita ini terus menurun dari tahun 1991, dimana pada tahun 1991 AKABA nasional adalah 97 per 1.000 KLH, turun menjadi 40 per 1.000 KLH pada tahun 2012 (SDKI 2012). Angka kematian Balita tahun 2015 dibawah target MDG,s Tahun 2015, dimana pada tahun 2015 target MDG,s adalah 32 / 1.000 KLH. Jika kita lihat AKABA Kab. Lima puluh kota dibawah angka nasional, namun mengalamii peningkatan dibanding tahun 2015.

5.2 MORBIDITAS

Tingkat kesakitan (morbidity) menggambarkan situasi derajat kesehatan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tingkat morbiditas penyakit menular terkait dengan komitmen internasional yang senantiasa menjadi sorotan dalam membandingkan kondisi kesehatan antar negara. Untuk itu disajikan gambaran morbiditas penyakit menular yang dapat menjelaskan keadaan derajat kesehatan.

- a. Penyakit Malaria, kasus kesakitan malaria tahun 2016 adalah 2 kasus angka kesakitan (annual parasite incidence) berada pada angka 0,005 per 1.000 penduduk.
- b. Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA (+) pada tahun 2015 sebesar 73 % dengan jumlah penderita sebanyak 213 orang. Angka keberhasilan pengobatan pada tahun 2015 adalah 82,1 %. Pada tahun 2015 jumlah penderita yang ditemukan adalah 208 orang, dengan case notification rate BTA (+) sebesar 56,37 per 100.000 penduduk, sedangkan case notification rate untuk seluruh kasus TB sebesar 104,34 per 100.000 penduduk.
- c. Jumlah kesakitan Demam berdarah tahun 2016 sebanyak 230 kasus (insiden rate 61,7 / 100.000 penduduk). angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu 190 kasus (51,6/100.000 penduduk). Pada tahun 2016 ini kasus terbanyak terjadi di kecamatan Guguk (dengan wilayah puskesmas dangung-dangung 44 kasus dan puskesmas padang kandis 6 kasus).
- d. Diare, tahun 2016 adalah 6.566 kasus, kasus ini turun jika dibandingkan dengan tahun 2015 adalah 6990 orang. Data program diare ditemukan 7.017/kasus diare atau 89,07 dari perkiraan kasus, angka kesakitan diare sebesar 19,06 per 1.000 penduduk.
- e. Pneumonia, penemuan kasus pneumonia Tahun 2016 538 kasus atau 14,58%, dan ini turun jika dibandingkan Tahun 2015 yaitu 606 kasus atau 15,70 %, lebih rendah dari perkiraan jumlah kasus yaitu 10% dari jumlah balita yaitu sekitar 3.858 kasus.

- f. Rabies, kasus rabies tahun 2016 adalah 0 kasus dengan kasus gigitan 392, dan ini mengalami penurunan kasus dibanding tahun 2015 adalah 448 kasus gigitan hewan penular rabies (HPR), dari jumlah itu ada 52 kasus positif. Kasus yang mendapatkan VAR sebanyak 286 kasus dan SAR sebanyak 0 kasus. Dan tahun 2015 ini tidak ada kasus meninggal.
- g. Pola 10 Penyakit terbanyak, Diare 6566 kasus, TB Klinis 395 kasus, Kasus gigitan 392, DBD 230 kasus, TB BTA + 213, Filariasis 14 kasus, Kusta 4, Malaria 2 kasus,

5.3 STATUS GIZI

Status Gizi merupakan salah satu kurang dalam pencapaian derajat kesehatan. Terjadinya gizi buruk pada balita antara lain karena kurangnya asupan gizi dan serangan penyakit infeksi. Faktor penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan ketidaktersediaan pangan yang bergizi, keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan anak balita.

Upaya mengatasi prevalensi gizi buruk dilakukan antara lain melalui:

- 1). Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
- 2). Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
- 3). Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin.
- 4). Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan posyandu, Dan;
- 5). Pelayanan gizi bagi ibu hamil (berupa tablet besi) dan Balita (berupa makanan pendamping ASI) dari keluarga miskin.

Indikator BB/U memberikan gambaran tentang status gizi secara umum, mengindikasikan ada tidaknya masalah gizi pada Balita, tetapi tidak mengindikasikan apakah masalah gizi tersebut kronis atau akut. Berdasarkan indikator ini status gizi balita dinyatakan atas 4 kategori yaitu Gizi Buruk, Gizi Kurang, Gizi Baik dan Gizi Lebih.

Indikator BB/TB menggambarkan status gizi yang bersifat akut, sebagai akibat keadaan yang berlangsung dalam waktu yang pendek, seperti Diare . Indikator ini terdiri dari 4 kategori yaitu sangat kurus, kurus, normal dan gemuk.

Indikator TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama. Misalnya kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Pada gambar berikut ini dapat kita lihat gambaran status gizi balita menurut hasil penimbangan massal dari tahun 2016 sampai tahun 2015, dari data tersebut dapat diketahui adanya penurunan persentase Balita Gizi buruk dari 0,09% tahun 2016 naik dibanding tahun 2015 adalah 0,04 %.

Berdasarkan indikator BB/TB, UNHCR menyatakan besarnya masalah kekurusan (gabungan sangat kurus dan kurus) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat adalah jika prevalensi kekurusan > 5%, serius jika prevalensi kekurusan antara 10,1% -15,0%, dan kritis bila prevalensi kekurusan sudah diatas 15, 0%.

Hasil riskesdas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi kekurusan di propinsi Sumatera Barat meningkat menjadi 12, 6% dibandingkan tahun 2010 yaitu 8,2 %. Berarti hal ini masih menjadi masalah bagi propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota dari hasil riskesdas 2013, menunjukkan bahwa jika dilihat dari tiga indikator status gizi yaitu BB/U untuk status buruk dan kurang berada pada angka 27,6%, TB/U untuk status sangat pendek dan pendek berada pada angka 28,8 %, dan BB/TB untuk status sangat kurus dan kurus berada pada angka 15%. Angka sangat kurus di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 5,9%, angka ini berada diatas angka nasional dan provinsi yaitu 5,2% dapat kita simpulkan, bahwa masalah gizi pada balita masih harus menjadi perhatian dimasa yang akan datang.

5.4 KELUARGA BERENCANA.

Jumlah akseptor KB aktif tahun 2016 adalah 40.390 jauh turun dibandingkan dengan tahun 2015 tercatat sebanyak 43.364 akseptor dengan

berbagai jenis alat kontrasepsi yang digunakan seperti IUD, Pil, Kondom, Suntik, Implant dan lain sebagainya. Sementara Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan masyarakat tahun 2016 adalah dengan Suntik sebanyak 22.819, kemudian Pil KB sebanyak 7907.

Tabel 5.1
Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-Laki			Total
		MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jumlah	MOP	Kondom	Jumlah	
1	Harau	215	905	558	2936	764	5378	33	286	319	5697
2	Luak	103	298	232	1769	581	2983	14	183	197	3180
3	Payakumbuh	197	287	577	2006	713	3780	30	224	254	4034
4	Lareh Sago Halaban	97	176	494	3517	653	2994	3	196	199	3193
5	Mungka	76	174	328	1902	514	2994	5	206	211	3205
6	Suliki	125	326	236	575	256	1518	13	108	121	1639
7	Situjuh Limo Nagari	59	675	312	817	467	2330	7	127	134	2464
8	Akabiluru	69	191	245	1732	396	2633	11	152	163	2796
9	Guguak	143	384	339	1329	743	2938	10	157	167	3105
10	Kapur IX	45	111	53	2074	1536	3821	4	193	197	4018
11	Bukik Barisan	47	209	271	1726	381	2635	-	163	163	2798
12	Gunuang Omeh	29	199	345	369	355	1297	-	75	75	1372
13	Pangkalan Koto Baru	90	153	425	2069	548	3285	3	141	144	3429
	Kabupaten	1295	4088	4416	22819	7907	38.586	133	2211	2344	40930

BAB VI

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Negara Republik Indonesia mengatur hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan ditegaskan didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berperan disegala bidang pembangunan.

Representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan merupakan hal penting untuk mewujudkan demokratisasi. Representasi ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

Jika kita lihat jumlah perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Bab III didapatkan jumlah penduduk pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dibanding laki-laki. Dan juga jumlah penduduk pada usia 40-64, menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan domestik. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik. Untuk itu Perempuan tidak hanya harus berperan di ranah domestik tetapi peranan perempuan diranah publik akan diuraikan dibawah ini.

6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif

Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini. Hal ini mengandung arti bahwa program atau kebijakan yang dihasilkannya dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan karena kebijakan dan program tersebut dibuat dengan

mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat bagaimana keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di kabupaten lima puluh kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Jumlah anggota DPRD di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016

NO	Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Perempuan
1	Kab. Lima Puluh Kota	32	3	35	8,6 %
Jml		32	3	35	8,6 %

Berdasarkan Tabel 6.1 terlihat bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 adalah sebesar 3 Orang. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016 adalah 8,6%, jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga Eksekutif. Ini menunjukkan bahwa harapan untuk mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di legislatif masih memerlukan kerja keras dan perjuangan pada berbagai pihak.

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif.

Tabel 6.2
Jumlah dan Persentase PNS Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2016

No	Jenis jabatan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1	Fungsional Umum	869	44,56	1081	55,43	1950
2	Fungsional Tertentu	943	24,46	2911	75,53	3854
3	Eselon I	0	0	0	0	0
4	Eselon II	28	87,5	4	12,5	32
5	Eselon III	127	73,41	46	26,58	173
6	Eselon IV	340	55,46	273	44,53	613
	JUMLAH	2307	57,07	4315	42,91	6622

Dari Tabel 6.2 dapat diperoleh gambaran keterlibatan perempuan dan laki-laki pada sektor eksekutif, dimana dapat dilihat perbandingan persentase perempuan dibidang eksekutif, yaitu pada eselon II berjumlah 32 orang dengan rincian laki-laki 28 orang dan perempuan 4 orang sebanyak 12,5 %, Eselon III tahun 2016 berjumlah 173 orang dengan rincian laki-laki 127 orang dan perempuan 46 orang (26,58%), jumlah ini sama dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 173 orang dengan rincian 129 laki-laki, 44 perempuan (25,436), dan pada Eselon IV tahun 2016 berjumlah 613 orang dengan rincian 340 laki-laki dan 273 (44,53%) perempuan jumlah ini turun jika dibanding tahun 2015 yaitu 615 orang, dengan rincian 341 laki-laki dan 274 orang perempuan (44,55 %), ini dapat diartikan begitu jauh perbedaan persentase laki-laki dibandingkan persentase perempuan, dimana

laki-laki pada eselon II jumlahnya 7 kali perempuan, pada eselon III jumlahnya 3 kali perempuan, eselon IV jumlahnya 2 kali perempuan, sementara pada jabatan fungsional perempuan 68,78 %. Ini membuktikan peran perempuan sangat dominan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan langsung ke sarasannya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan program. Namun jika dilihat minimal keterlibatan perempuan pada sektor publik adalah 30% belum tercapai pada eselon II dan III, baru pada eselon IV yaitu 44,5%.

Tabel 6.3
Jumlah dan Persentase PNS Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

No	Jenis jabatan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jlh
1	Golongan I	46	97,87	1	2,12	47
2	Golongan II	506	45,01	618	54,98	1.124
3	Golongan III	1.050	32,82	2.149	67,17	3.199
4	Golongan IV	705	31,30	1.547	68,69	2.252
	JUMLAH	2.307	34,83	4.315	65,16	6.622

Data tentang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dirinci menurut jenis golongan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan serta jenis kelamin dengan jumlah pegawai pada tahun 2016 adalah sebanyak 6.622 orang, yang terdiri dari orang laki-laki 2.307 dan 4.315 orang perempuan. Kalau dilihat menurut golongan/ruang, pegawai golongan (I) tercatat sebanyak 47 orang, golongan (II) tercatat sebanyak 1.124 orang, golongan (III) tercatat sebanyak 3.199 orang dan pegawai golongan (IV) tercatat sebanyak 2.252 orang.

Dari tabel 6.3 dapat dilihat gambaran keterlibatan perempuan pada bidang Eksekutif dimana pada golongan ruang I sebanyak 2,12%, golongan ruang II sebanyak 54,98%, golongan ruangan III sebanyak 67,17%, golongan ruang IV sebanyak 68,69 %, dapat dilihat semakin tinggi golongan ruangnya semakin tinggi persentase perempuannya.

6.3 Partisipasi perempuan di bidang yudikatif

Tabel 6.4
Jumlah dan Persentase Jaksa Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

No	Jenis jabatan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jlh
1	Fungsional	7	35	13	65	20
2	Struktural	6	100	0	0	6
3	Eselon I	0	0	0	0	0
4	Eselon IIa	0	0	0	0	0
5	Eselon IIb	0	0	0	0	0
6	Eselon IIIa	1	100	0	0	1
7	Eselon IIIb	0	0	0	0	
8	Eselon IV	5	100	0	0	5
9	Eselon V	0	0	0	0	0
	Jumlah	19	59,37	13	40,62	32

Berdasarkan Tabel 6.4 terlihat bahwa keterwakilan perempuan dibidang yudikatif di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 adalah sebesar 13 Orang. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga yudikatif di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016 adalah 40,62 %, menurun dibanding tahun lalu yaitu 47,6 % dan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan dan lebih sedikit jika dilihat di bidang eksekutif. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan untuk mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di yudikatif sudah memenuhi target, walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.

Tabel 6.5
Jumlah dan Persentase Polisi Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

No	Jenis jabatan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jlh
1	Ajun Komisaris Besar Polisi	1	100	0	0	1
2	Komisaris Polisi	4	100	0	0	4
3	Ajun Komisaris Polisi	12	100	0	0	12
4	Inspektur Satu Polisi	16	100	0	0	16
5	Inspektur Dua Polisi	22	100	0	0	22
6	Ajun Inspektur Polisi Satu	44	100	0	0	44
7	Ajun Inspektur Polisi Dua	10	100	0	0	10

8.	Brigadir Kepala	46	93,87	3	6,12	49
9	Brigadir	79	94,04	5	5,95	84
10	Brigadir Polisi Satu	18	94,73	1	5,26	19
11	Brigadir Polisi Dua	33	70,21	14	29,78	47
	Jumlah	258	91,81	23	8,18	281

Berdasarkan Tabel 6.5 terlihat bahwa keterwakilan perempuan dibidang Yudikatif di Kepolisian Lima Puluh Kota Tahun 2016 adalah sebesar 23 Orang. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga yudikatif di Kepolisian Lima Puluh Kota untuk tahun 2016 adalah 8,18 %, meningkat dibanding tahun lalu dan lebih sedikit jika dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan dan di bidang eksekutif. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan untuk mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di yudikatif di kepolisian perlu ditingkatkan.

Tabel 6.6
Jumlah dan Persentase Hakim Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

No	Jenis jabatan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jlh
1	Ketua Pengadilan Tinggi	1	100	0	0	1
2	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang	1	100	0	0	1
3	Hakim Pengadilan Tinggi Padang	14	93,3	1	6,6	15

4	Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Pati	1	100	0	0	1
5	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Pati	1	100	0	0	1
6	Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Pati	2	66,6	1	33,3	3
	Jumlah	20	90,90	2	9,09	22

Berdasarkan Tabel 6.6 terlihat bahwa keterwakilan perempuan dibidang Yudikatif di Kehakiman Tahun 2016 adalah sebesar 22 Orang. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, perbandingan keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga yudikatif di Kehakiman untuk tahun 2016 adalah 9,09 %, meningkat dibanding tahun lalu dan lebih banyak jika dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan dan lebih sedikit jika di bandingkan keterwakilan perempuan dibidang eksekutif. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan untuk mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di yudikatif di kehakiman perlu ditingkatkan.

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGA KERJAAN

Sejalan dengan perkembangan perekonomian negara-neagara di dunia, berbagai penelitian tentang permasalahan yang dihadapi negara berkembang telah dilakukan termasuk diantaranya oleh Todaro (1987) dan Nafziger (1990). Penelitian itu mengungkapkan bahwa permasalahan utama d negara berkembang adalah adanya ketidakmerataan pendapatan dan pengangguran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oelh pengurangan pengangguran, karena hal ini sangat tergantung pada bagaimana memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena secara teori pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 500 ribu pekerja.

Sebagaimana yang dialami banyak negara berkembang, indonesia juga memiliki masalah dilematis dalam hal ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi selaras dengan penciptaan lapangan pekerjaan belum bisa memenuhi kesetaraan pekerja laki-laki dan perempuan. Dari sisi penduduk yang bekerja, lapangan pekerjaan dan sektor pekerjaan secara umum mencerminkan ketimpangan gender.

Menurut MDG's bahwa untuk mengukur kesetaraan di bidang tenaga kerja antara lain dapat diukur dari tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, persentase upah perempuan disektor non pertanian dan perbedaan upah anatara tenga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.

Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan, karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan. Indikator ini juga memungkinkan diketahuinya permasalahan yang akan muncul apabila ketenagakerjaan bermasalah. Misalnya banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap dapat menimbulkan pengangguran yang pada gilirannya akan berdampak baik secara ekonomi maupun sosial. Dibandingkan dengan laki-laki perempuan relatif sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bernilai ekonomis baik. Oleh karena itu kebanyakan perempuan bekerja disektor informal.

Jika kita lihat Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 tercatat sebanyak 372.568 jiwa, dengan rincian 184.995 jiwa penduduk laki-laki dan 187.573 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 99 persen. Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di dominasi oleh penduduk yang berusia anak. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah sebanyak 38.285 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 60 s/d 64 tahun yaitu sebesar 16.112 jiwa.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang dianggap dapat memproduksi barang dan atau jasa.

Pada tahun 2016 jumlah Angkatan kerja tercatat sebesar 187.746 jiwa dengan rincian 180.648 jiwa bekerja dan sebesar 7.098 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2016 sebesar 72.317 jiwa dengan rincian sebanyak 22.960 jiwa sedang bersekolah, 34.591 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 14.766 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

7.1 Penduduk dengan Kegiatan Utama

Tabel 7.1
Banyaknya Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin

NO	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	104.516	83.230	187.746
	a. Bekerja	99.925	80.723	180.648
	b. Pengangguran	4.591	2.507	7.098
II	Bukan Angkatan Kerja	22.562	49.755	72.317

	a. Sekolah/Attending School	12.018	10.942	22.960
	b. Mengurus RT/House Keeping	3.063	31.528	34.591
	c. Lainnya/others	7.481	7.285	14.766

Data tabel 7.1 menunjukkan bahwa perempuan yang berkerja lebih sedikit dari pada laki-laki, padahal dikabupaten lima puluh kota jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun kalau dilihat di bukan angkatan kerja perempuan dengan kegiatan mengurus rumah tangga jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki yaitu 31.528. kegiatan ini pada umumnya merupakan tanggung jawab perempuan. Dengan bekerja mengurus rumah tangga, maka perempuan dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja. Artinya tidak diperhitungkan sebagai tenaga kerja yang perlu dicarikan solusinya, sebagaimana angkatan kerja.

7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 7.2
Angkatan Kerja dan tingkat partisipasi (TPAK)
Menurut JenisKelamin Tahun 2016

NO	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	Angkatan Kerja Economically active	104.516	83.230	187,746
	c. Bekerja	99.925	80.723	180.648
	d. Pengangguran	4.591	2.507	7.098
	Jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk /percentage Economically Active to total Pop	57,68	45.19	51,44
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja/Participation of economically active	82,25	62,59	72,42
	Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate	4,39	3,01	3,70

Meskipun dari tahun ketahun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat, tetapi perbedaannya sangat nyata apabila dibandingkan dengan partisipasi angkatan laki-laki Berdasarkan data sakernas 2008 TPAK perempuan sebesar 51,25 persen dan laki-laki 83,58 persen. Jika kita lihat di Kabupaten Lima Puluh Kota dari data tahun 2016 pada tabel 7.2 dapat diketahui kondisinya hampir sama yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan yaitu 82,25 % laki-laki dan 62,29% perempuan. Artinya jumlah pengangguran perempuan seharusnya jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, namun didata tahun 2016 jumlah pengangguran laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

Lebih jauh kondisi ini dapat dilihat dari data dibawah ini, yang memaparkan jumlah penduduk usia kerja berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Sebagaimana diketahui jumlah penduduk perempuan di kabupaten lima puluh kota lebih banyak dibanding laki-laki, artinya jumlah penduduk usia kerja perempuan juga lebih banyak dibanding laki-laki. Namun dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa hampir disetiap kelompok umur jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi, bahkan kelompok diatas 60 tahun jumlah penduduk perempuan juga lebih besar.

Dengan demikian apabila realitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka secara ekonomi kehidupan perempuan akan semakin lebih banyak tergantung pada laki-laki. Hal ini juga terkait dengan perubahan sistem sosial masyarakat minangkabau yang tidak lagi menopang perempuan secara ekonomi.

7.3 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kelamin

Tabel 7.3
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016

No	Kelompok umur (tahun)	Jumlah penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	15-19	14675	13030	27705

2	20-24	11687	11371	23058
3	25-29	13533	13452	26985
4	30-34	14032	14215	28247
5	35-39	13619	13918	27537
6	40-44	12217	12071	24288
7	45-49	10556	10693	21249
8	50-54	9546	10750	20296
9	55-59	9175	10548	19723
10	60-64	7875	8237	16112
11	65+	11637	15928	27565
	Kabupaten	128.552	134.213	262.762

7.4 Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin

Bila dilihat dari status pekerjaan utama, data dari tabel 7.4 menggambarkan kalau perempuan lebih banyak bekerja di pada sektor pertanian (39.233 orang) dan perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (14.605 orang) . Meskipun demikian ada cukup banyak perempuan bekerja di industri (9.332 orang). Masih banyak perempuan belum mendapatkan pekerjaan utama yang lebih menguntungkan baik secara ekonomi maupun secara sosial.

Tabel 7.4
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha dan Jenisnya

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pertanian	47.509	39.233	86.746
2	Pertambangan dan Penggalian	3.334	246	3.580
3	Industri/ Manufacture	6.425	9.332	15.757
4	Listrik dan Gas	613	0	613
5	Konstruksi	8.775	222	8.997
6	Perdagangan, Rumah makan dan jasa akomodasi	15.537	14.605	30.142

7	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	3.884	306	4.190
8	Lembaga keuangan real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	2.571	428	2.999
9	Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan	11.277	16.351	27.628
Total		99.925	80.723	180.648

Tabel 8.6
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					
		Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi
1	Harau	1	0	0	1	0	0
2	Luak	0	0	0	0	0	0
3	Payakumbuh	0	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	1	0	0	0	0	0
5	Mungka	1	0	0	0	0	0
6	Suliki	0	0	0	0	0	0
7	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	0	0	0
8	Akabiluru	0	0	0	0	0	0
9	Guguak	0	0	0	0	0	0
10	Kapur IX	0	0	0	0	0	0
11	Bukik Barisan	0	0	0	0	0	0
12	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0	0
13	Pangkalan Koto Baru	0	0	0	0	0	0
	Kabupaten	3	0	0	1	0	0

Tabel 8.11
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian
Tahun 2016

No	Kecamatan	Tempat Kejadian			
		Rumah	Lingkungan	Sekolah	Lainnya
1	Harau	0	0	0	0
2	Luak	0	4	0	6
3	Payakumbuh	0	0	0	5
4	Lareh Sago Halaban	0	3	0	6
5	Mungka	0	2	0	1
6	Suliki	0	0	0	0
7	Situjuah Limo Nagari	0	2	0	2
8	Akabiluru	0	0	0	9
9	Guguak	0	0	0	5
10	Kapur IX	0	0	0	0
11	Bukik Barisan	0	2	0	2
12	Gunuang Omeh	0	0	0	0
13	Pangkalan Koto Baru	0	0	0	4
	Kabupaten	0	13	0	40

Tabel 8.14

Jumlah Guru SLB Negeri dan Swasta menurut Kecamatan, jenjang pendidikan dan jenis kelamin Tahun 2014

No	Kecamatan	Guru Negeri								Jumlah	Guru Swasta								Jumlah
		TK		SD		SMP		SMA			TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P			
1	Harau	0	0	5	6	0	2	0	0	13	0	0	0	0	0	1	0	1	2
2	Luak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Payakumbuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
4	Lareh Sago Halaban	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	2
5	Mungka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	6
6	Suliki	0	1	0	3	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Situjuh Limo Nagari	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	2	4	0	0	0	0	6
8	Akabiluru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Guguak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	2	0	0	10
10	Kapur IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bukik Barisan	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	2
12	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pangkalan Koto Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kabupaten	0	1	6	18	1	2	0	0	28	0	1	6	21	0	3	0	1	3

Tabel 8.15
Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Jenis ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)																								Total	
		Tuna Netra		Tuna Rungu		Tuna Grahita		Tuna Daksa		Tuna Laras		Anak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata		Tuna Ganda		Autis		Gangguan pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas		Lamban Belajar		Kesulitan Belajar		Gangguan Komunikasi			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L
1	Harau	0	0	8	7	45	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
2	Luak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Payakumbuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	0	0	2	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
5	Mungka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Suliki	0	0	0	1	9	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
7	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	4	26	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
8	Akabiluru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Guguak	0	0	4	4	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
10	Kapur IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bukik Barisan	0	0	5	0	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
12	Gunuang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Omeh																										
13	Pangkalan Koto Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kabupaten	0	0	19	16	130	71	2	1	0	0	0	0	1	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250



ACARA SOSIALISASI PERCEPATAN AKTE KELAHIRAN

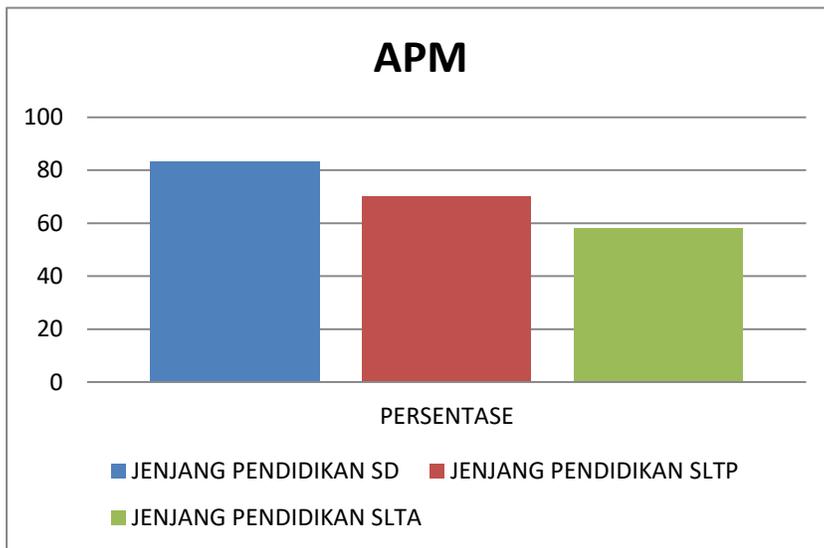


DATA PEMENUHAN HAK ANAK TAHUN 2017

1. CAPAIN PENDIDIKAN

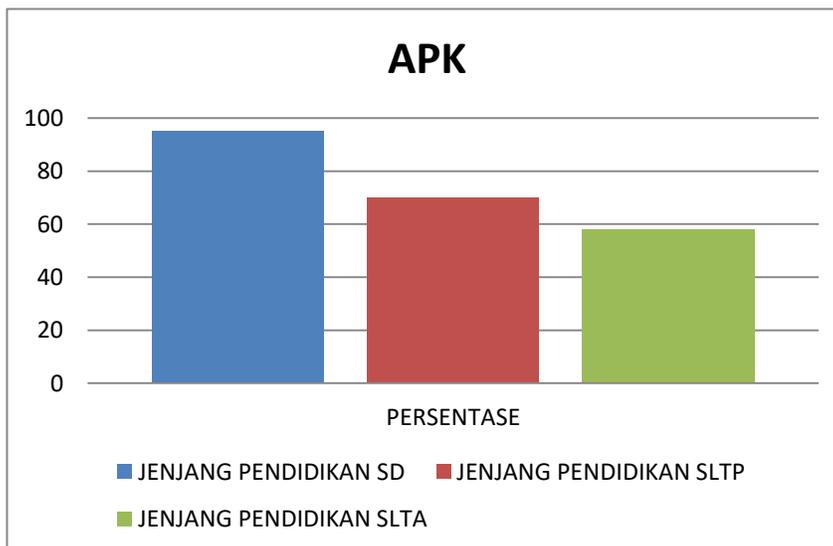
A. APM

JENJANG PENDIDIKAN		
SD	SLTP	SLTA
83	70	58



B. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APK)

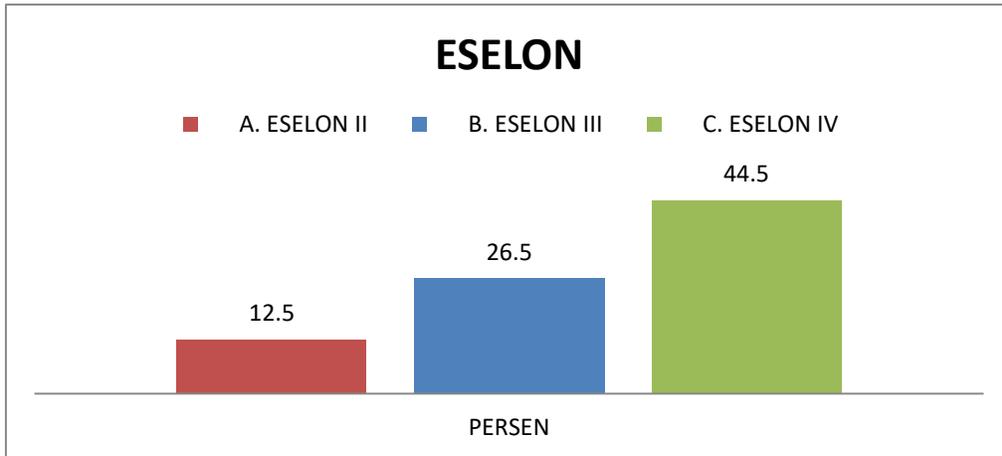
JENJANG PENDIDIKAN		
SD	SLTP	SLTA
95	70	58



PERAN PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

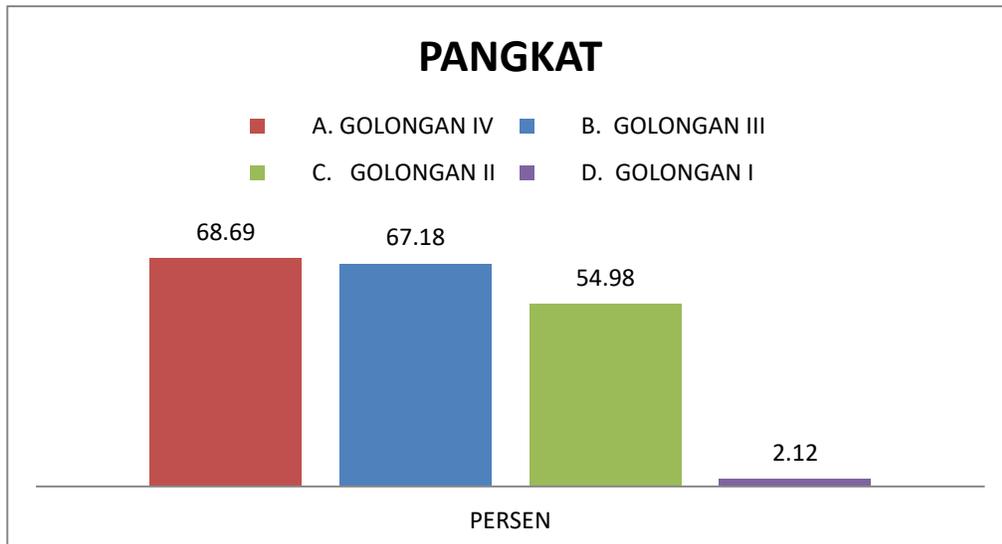
1. BIDANG EKSEKUTIF DENGAN JUMLAH PEGAWAI 6.622 (LAKI-LAKI =2.307 DAN PEREMPUAN ADALAH = 4.315)

ESELON	PERSENTASE
A. ESELON II	12.5
B. ESELON III	26.5
C. ESELON IV	44.5



PANGKAT

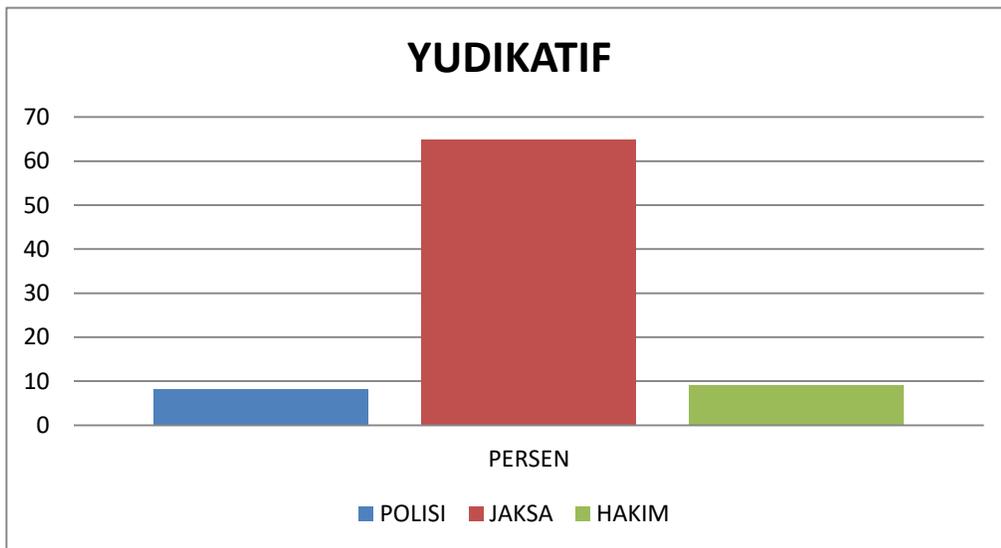
A. GOLONGAN IV	68.69
B. GOLONGAN III	67.18
C. GOLONGAN II	54.98
D. GOLONGAN I	2.12



2. BIDANG LEGISLATIF 8,6 % DENGAN JUMLAH ANGGOTA 35 ORANG (LK =32 DAN PEREMPUAN 3 ORANG)

3. BIDANG YUDIKATIF

	JABATAN	PERSENTASE
A	POLISI	8.2
B	JAKSA	65
C	HAKIM	9.1



315)

DOKUMENTASI DATA TERPILAH DARI SKPD 2015

1. DINAS PENDIDIKAN
2. DINAS KESEHATAN
3. BKD (DATA PNS)
4. DINSOSNAKERTRANS
5. DISDUKCAPIL
6. DINAS KOPERINDAG
7. POLRES
8. LAPAS
9. PENGADILAN
10. BPS
11. KESBANGPOL
12. BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)
13. DISBUDPORPORA
14. BPPKB